

Perekonomian Kalsel Melambat dan Terkontraksi Karena Terlalu Bertumpu pada Sumber Daya Alam Ekstraktif



<https://infobanua.co.id/2020/12/04/bank-indonesia-arahkan-seluruh-instrumen-kebijakan-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional>

Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 Kamis (3/11/2020) di Banjarmasin. Tema pertemuan “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”. Acara dirangkai dengan kegiatan PTBI 2020 Kantor Pusat Bank Indonesia secara daring yang dihadiri Presiden RI. Bank Indonesia (BI) optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19, dan 5 strategi respons kebijakan yaitu : 1) pembukaan sektor produktif dan aman, 2) percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), 3) peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, 4) stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan 5) digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM. Demikian disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam PTBI Tahun 2020.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI, Joko Widodo, menekankan bahwa momentum pertumbuhan positif ini harus dijaga. Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada serta tidak lengah agar tidak muncul pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan. PTBI merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia. Plt. Gubernur Provinsi Kalsel Rudy Resnawan menyampaikan pentingnya upaya transformasi mengingat beberapa tahun ke belakang perekonomian Kalsel sangat bergantung pada SDA ekstraktif. Ketergantungan tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi Kalsel yang tumbuh melambat ketika harga batubara mengalami penurunan. Rudy Resnawan juga menyampaikan semakin tingginya tantangan perekonomian sebagai dampak merebaknya pandemi COVID-19. Tantangan tersebut berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan triwulan III 2020 yang berkontraksi sebesar 4,68% (yoy), lebih dalam dari triwulan II 2020 yang berkontraksi 2,63%.

Sejalan dengan tema PTBI 2020, menurut Amanlison Sembiring, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, kerjasama dan koordinasi antar semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan ekonomi di tahun 2021. Perekonomian global yang secara bertahap mulai membaik harus memicu semangat optimisme pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan. Perekonomian domestik yang perlahan juga membaik harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak baik Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga/instansi vertikal, perbankan dan berbagai pihak lainnya guna mendorong pemulihan ekonomi. Penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 diharapkan dapat mendukung peningkatan aktivitas ekonomi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Di sisi lain percepatan realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta berbagai stimulus yang dikeluarkan diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat. Sementara restrukturisasi dan penjaminan kredit serta akselerasi ekonomi keuangan digital diharapkan dapat mendukung pemberdayaan UMKM di tengah pandemi.

Perbaikan ekspor dari negara mitra, pengerjaan berbagai infrastruktur pemerintah dan swasta serta inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran nasional, diharapkan dapat mendorong perbaikan prospek perekonomian Kalimantan Selatan di tahun 2021. Bank Indonesia mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun

2021, antara lain melalui (i) stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga; (ii) suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat, dan (iii) melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021. Bank Indonesia juga akan terus mengakselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, mempercepat pendalaman pasar uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025, terus mendukung pengembangan ekonomi-keuangan Syariah dan UMKM, dan terus aktif dalam berbagai forum internasional dari sisi kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Sumber Berita:

1. <https://infobanua.co.id>, Perekonomian Kalsel Melambat dan Terkontraksi Karena Terlalu Bertumpu pada Sumber Daya Alam Ekstraktif.
2. <https://borneo24.com>, Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia Lakukan 1 Prasyarat dan 5 Strategi.

Catatan:

Pengertian PEN

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Tujuan PEN

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

✚ Materi PEN

Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok, yaitu antara lain:

- a. prinsip yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan Program PEN;
- b. mekanisme perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVTD- 19);
- c. pelaksanaan Program PEN melalui PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan;
- d. pemulihan ekonomi melalui belanja negara yang antara lain dilakukan melalui pemberian subsidi bunga;
- e. pembiayaan program PEN untuk memberikan kejelasan mengenai sumber dana Program PEN dimaksud; dan
- f. pelaporan, pengawasan dan evaluasi untuk tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Program PEN.